

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN  
DI DESA TONANG KECAMATAN SENGAH TEMILA  
KABUPATEN LANDAK**

**Eliezer**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [eliezerezar@yahoo.co.id](mailto:eliezerezar@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa Tonang, judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan program Raskin yang ada di Desa Tonang yang masih belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian menggunakan tiga tahap yaitu; tahap 1. Menemukan permasalahan dan tahap 2. mendefinisikan permasalahan, merumuskan dan tahap 3. terakhir menyimpulkan permasalahan. Lokasi penelitian di Desa Tonang. Subjek penelitian adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat penerima Raskin.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang efektifnya pelaksanaan program Raskin karena infrastruktur yang kurang memadai, pengawasan yang tidak efektif dan komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus membenahi infrastruktur, meningkatkan pengawasan dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Raskin, Komunikasi dan Sumberdaya

**Abstract**

This script intend to evaluate the rice for poor implementation program at Tonang Village, title of the script raised by the issues of implementation rice for poor program at Tonang Village that still can't goes well. This script uses a qualitative research method by using three stages: phase 1. Find problems and phase 2. define problems, formulate and phase 3. concluded last issue. Research sites at Tonang Village. The subject of this research is village government, district government and society that accept the 'rice for poor'.

The conclusion of this script is the lack of implementation effectivity rice for poor program because inadequate infrastructure, ineffective supervision and communication that have not been well established between the government and the society. Therefore, the government should fix the infrastructure, improve supervision and establish good communication with the society.

Keywords : Evaluation, Rice for poor, Communication and Resources

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena ter edianya dana.

Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk, maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi melainkan juga untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan.

Program beras untuk keluarga miskin atau yang biasa dikenal dengan istilah Raskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui program Raskin diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan produktivitas keluarga miskin.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program beras miskin belum terjangkau secara menyeluruh berdasarkan

jumlah keluarga miskin yang ada serta belum tepatnya sasaran penerima bantuan program beras miskin tersebut. Karena penerima bantuan program beras miskin tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah pusat relatif lebih kecil dari realita jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang ada di Kalimantan Barat.

Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Provinsi Kalimantan Barat, maka Pemerintah Kabupaten Landak membuat peraturan yang berupa surat keputusan Bupati Landak Nomor 511.1/26/HK-2012 tentang pagu beras untuk keluarga miskin. Kabupaten Landak tepatnya di Desa Tona g Kecamatan Sengah Temila merupakan satu diantara desa penerima beras untuk rumah tangga miskin. Dalam prosesnya menurut penulis dari hasil pengamatan *pre survey* asih terdapat beberapa masalah, seperti: masih adanya protes dari masyarakat berkaitan dengan kejelasan data penerima beras miskin yang sering kali mengalami perubahan, pendistribusian yang tidak sesuai jadwal, yakni terjadi keterlambatan yang tidak disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak mengerti apa penyebab dan masalahnya serta pemberian beras miskin dirasa masih belum tepat, dimana terdapat masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapat sedangkan yang tingkat ekonominya lebih tinggi mendapatkan bantuan tersebut.

Adanya berbagai masalah dalam program Raskin di Desa Tonang mengindikasikan masih banyaknya masalah. Hal ini sehingga membuat tidak efektifnya program yang telah diberikan oleh pemerintah dan bisa pula berdampak pada terbuangnya keuangan negara. Selama ini program yang telah dilaksanakan seharusnya dilakukan evaluasi agar menjadi masukan kepada pemerintah untuk program-program yang diberikan terutama yang berkaitan dengan masyarakat miskin. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Program Beras Miskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah yaitu “mengapa proses pelaksanaan program beras miskin kurang berhasil?”

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program beras miskin serta mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan program beras miskin kurang berhasil.

## 4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan Ilmu Pemerintahan secara umum yaitu:

- a. Mengenai pelaksanaan dan evaluasi program beras miskin di tingkat desa.

- b. Menambah wawasan, penalaran dan pemahaman untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari pada program studi ilmu pemerintahan, sebagai pengetahuan untuk bekal dilapangan.
- c. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam perencanaan kebijakan beras miskin maupun pelaksanaan program beras miskin.
- d. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan program beras miskin kedepannya.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori

#### a. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003: 12) ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

#### 1. komunikasi.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti

tau apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini mesti jelas, akurat dan konsisten.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan.; informasi relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan.

## 3. Disposisi

Cara dimana para implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga, bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya, pada gilirannya, akan dipengaruhi berbagai pandangan terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadinya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan

organisasi dan dirinya, mana kala mereka cukup pengetahuan, mendalami dan memahaminya.

## 4. Struktur Birokrasi

Fragmentasi organisasional mungkin merintang koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintang perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah kepada kebijakan bekerja dalam lintas tujuan serta menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan ubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan pihak organisasi luar. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup di ensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dari empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik peneliti hanya mengkaji dua variabel hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan dilapangan, yaitu:

1. Komunikasi
  2. Sumberdaya
- b. Evaluasi kebijakan Publik :

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan

publik yang ditentukan Muhadjir (dalam Widodo 112: 2008).

Langbein (dalam Widodo 2008: 116) membedakan tipe riset evaluasi menjadi dua macam tipe, yaitu riset *process* dan riset *outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan kasual. Winarno (2012: 234), menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah “suatu usaha menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit. kehidupan nyata”. Disini dijelaskan bahwa sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit, tujuannya adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 67). Metode ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang evaluasi pelaksanaan program beras miskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris (Masyhuri, 2008:13). Penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang berupa pendiskripsian evaluasi pelaksanaan program beras miskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila.

Subjek yang akan digunakan sebagai informan dalam melakukan wawancara atau yang akan diobservasi. Subjeknya sebagai berikut.

1. Camat Sengah Temila
2. Kepala Desa Tonang
3. Tiga orang masyarakat yang menerima beras miskin Desa Tonang.

Agar tidak menyimpang dari fokus penelitian, penulis menentukan objek penelitian. Adapun objek atau apa yang akan diteliti adalah program beras miskin untuk rumah tangga miskin (RASKIN).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:12) ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang bertanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini mesti jelas, akurat dan konsisten.

Dalam hal ini komunikasi sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam proses pelaksanaan suatu program Raskin tersebut, terutama komunikasi antara pihak Kabupaten kepada pihak Kecamatan hingga pihak Pemerintah Desa yang merupakan pelaksana secara langsung program Raskin kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan maupun pihak dari Pemerintah Desa, komunikasi yang terjalin selama ini cukup baik dimana ketika program tersebut akan dilaksanakan pihak Kabupaten selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan maupun dengan pihak Pemerintah Desa, kemudian pihak Kecamatan juga melakukan rapat koordinasi secara khusus dengan pihak Pemerintah Desa sebelum program Raskin tersebut dilaksanakan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasi kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semua sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan.

Sumber daya juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi suatu program dengan demikian sumber daya sebagai penunjang agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara

dengan pihak Kecamatan dan pihak Desa terdapat beberapa masalah.

Yaitu tidak tersedianya tempat penampungan sementara atau gudang untuk menyimpan Raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat serta infrastruktur jalan dan jembatan menuju titik bagi dalam keadaan rusak.

Menurut Muhadjir (dalam Widodo, 2008:112). Yaitu: pertama, tipe evaluasi hasil merupakan riset yang mendasarkan diri kepada tujuan kebijakan. Kuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan.

Kecamatan Sengah Temila tepatnya di Desa Tonang Kabupaten Landak merupakan satu di antara desa penerima bantuan Raskin dengan demikian program tersebut dapat dievaluasi pelaksanaannya, agar pelaksanaan program tersebut kedepannya menjadi lebih baik serta kita dapat mengetahui permasalahan yang selama ini terjadi.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terdapat dalam keputusan Bupati Landak Nomor: 511.1/26/HK-2012 Tentang Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Landak Tahun 2012. Hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila masih banyak kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan

melakukan wawancara dan penelitian terhadap Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat maka evaluasi pelaksanaan dapat dilakukan guna untuk tercapainya pelaksanaan program Raskin selanjutnya dengan lebih baik.

Dilihat dari mekanisme pelaksanaan dalam penyediaan beras bahwa perum bulog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres perberasan yang berlaku. Dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat, menyatakan bahwa beras yang disalurkan terkadang tidak tepat waktu dan memiliki kualitas yang kurang baik untuk dikonsumsi. Selain kualitas Raskin yang tidak layak untuk dikonsumsi harga dari Raskin tersebut juga lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, masyarakat juga mengatakan bahwa jumlah Raskin yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa penerima Raskin tidak sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) karena masih ada beberapa rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan Raskin sedangkan keluarga yang mampu mendapatkan bantuan tersebut serta jadwal pembagian Raskin tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sering mengalami keterlambatan dengan alasan dari pihak kecamatan sulitnya menuju tempat pendistribusian Raskin, sosialisasi tentang program Raskin juga dirasakan oleh masyarakat sangat kurang sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui tentang program tersebut.

Hasil dari evaluasi maka dapat ditemukan beberapa faktor penyebab kurang berhasilnya program beras miskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yaitu:

a. Infrastruktur yang kurang memadai

Infrastruktur yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup tempat penyimpanan serta sarana dan prasarana transportasi. Tidak terdapat gudang penyimpanan yang seharusnya memang sudah disediakan sebagai tempat penyimpanan Raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat baik ada tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Sehingga sebagai alternatif untuk tempat penyimpanan Raskin menggunakan kantor camat atau kantor kepala desa bahkan rumah dinas. Selain tidak tersedianya gudang penyimpanan, infrastruktur yang menjadi kendala dalam pendistribusian Raskin ialah sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melakukan pendistribusian dengan tepat waktu. Jalan-jalan dan jembatan yang menuju desa-desa tertentu banyak yang rusak parah sehingga alat transportasi tidak dapat menjangkau desa yang mendapatkan Raskin. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah desa bahkan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengangkut Raskin dari tempat penyimpanan sementara. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat yang menerima.

b. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi menjadi satu di antara faktor yang menyebabkan program Raskin kurang berhasil, yaitu kurangnya pengumuman dan sosialisasi oleh pemerintah desa tentang adanya program Raskin kepada masyarakat sehingga

menyebabkan banyak dari masyarakat tidak mengetahui struktur program tersebut, serta kurangnya transparansi atau keterbukaan pemerintah desa dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat (RTSPM) Raskin. Dilihat dari hasil wawancara dan pendataan yang dilakukan saat penelitian, terdapat kejanggalan pada pendataan masyarakat penerima Raskin. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima Raskin. Banyak masyarakat dengan kategori rumah tangga miskin tidak memperoleh program Raskin. Namun, ada beberapa penerima program Raskin dari masyarakat dengan kategori rumah tangga mampu.

Program Raskin yang dilaksanakan dengan kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat juga menimbulkan masalah yang tidak hanya pada pendataan penerima program Raskin. Akan tetapi masyarakat juga mengeluhkan mengenai jumlah dan harga Raskin yang diterima masyarakat sebenarnya. Karena dari hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa harga pada setiap bulan dari program raskin yang seharusnya dengan harga Rp. 1.600 per kilogram menjadi tidak teratur. Dari hasil wawancara dari masyarakat bahwa harga yang dibayar tidak pernah di bawah Rp. 2.000 per kilogram.

Masyarakat yang menerima program Raskin juga mengeluhkan mengenai banyaknya Raskin yang diterima setiap bulan. Karena setiap bulan penerimaan Raskin selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya transparansi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah beras yang mereka terima setiap bulan. Yang seharusnya masyarakat

menerima Raskin sebanyak 15 kg perbulan. Dari hasil wawancara masyarakat kadang hanya menerima sebanyak 10 kg perbulan dan tidak setiap bulan masyarakat menerima Raskin, bahkan tiga bulan sekali dengan jumlah 15 kg. Hal-hal tersebut banyak menimbulkan protes dari warga namun aparat desa tidak mengindahkan protes dari masyarakat yang menyatakan kekesalannya terhadap kinerja pemerintah desa mengenai program Raskin yang ada.

#### c. Pengawasan yang kurang efektif

Faktor pengawasan yang efektif juga menjadi satu di antara kunci sukses dari sebuah program yang dibuat pemerintah. Dalam pelaksanaan program Raskin yang ada di Desa Tonang Kecamatan Senah Temila Kabupaten Landak pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas Raskin kabupaten hanya sampai pada tingkat kecamatan dan tidak sampai pada tingkat desa serta tidak turun langsung mengawasi pembagian hingga dititik distribusi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan proses pendataan tidak merata. Bahkan jumlah Raskin yang diusulkan tidak sesuai dengan jumlah Raskin yang diterima serta kualitas Raskin kadang tidak layak untuk dikonsumsi. Seharusnya tim pengawas Raskin harus turun langsung mengawasi distribusi kepada masyarakat sehingga bisa mengetahui apa saja kendala yang terjadi di lapangan dan mengevaluasinya agar pelaksanaan kedepannya menjadi lebih baik.

### D. Simpulan dan Keterbatasan

#### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Penulis menyimpulkan ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa proses pelaksanaan program beras miskin kurang berhasil, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Tonang masih belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa, dalam pelaksanaan program Raskin pemerintah Desa hanya menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah Kecamatan sedangkan komunikasi dengan masyarakat masih sangat kurang terutama dalam hal sosialisasi tentang program Raskin, dengan demikian banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas tentang program tersebut. hal ini menyebabkan komunikasi yang dilakukan terlihat belum efektif.

##### a. Kurangnya komunikasi

Komunikasi mengenai program Raskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat kurang informasi mengenai program Raskin yang dijalankan pemerintah. Aparatur di Desa Tonang tidak transparansi terhadap masyarakat mengenai program Raskin sehingga masyarakat di Desa Tonang yang menerima Raskin mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh aparatur desa. Komunikasi yang kurang antara masyarakat dan aparatur desa menjadi kendala untuk terlaksananya program Raskin. Hal tersebut sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah mengenai komunikasi dan informasi mengenai suatu

program kerja agar tercapai hasil yang maksimal.

##### b. Pengawasan yang tidak efektif

Keefektifan suatu kinerja sangat dituntut dalam melakukan program kerja. Seperti halnya program Raskin yang dilaksanakan pemerintah seharusnya dapat mengurangi beban masyarakat dalam kebutuhan rumah tangga. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak program Raskin yang dilaksanakan tidak dapat dikatakan berhasil dalam menagani beban masyarakat yang kurang mampu. Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan pendataan yang tidak tepat. Hal tersebut banyak menimbulkan protes dari masyarakat.

#### 2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu pelaksanaan program tidak terlepas dari sumber daya sebagai penjunjang kegiatan tersebut, dari hasil penelitian dilapangan terdapat permasalahan yaitu pada sarana tempat dimana Raskin akan disimpan sebelum didistribusikan kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin, dengan tidak adanya tempat penyimpanan sementara Raskin tersebut sehingga mengganggu kantor Desa dan Rumah pribadi kepala desa serta infrastruktur jalan menuju tempat pendistribusian Raskin yang rusak berat sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluran serta tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tim satuan kerja Raskin Kabupaten, kemudian kepala Desa juga mengatakan bahwa jumlah Raskin yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah Raskin yang datang hal ini juga

menyebabkan sulitnya pihak Pemerintah Desa untuk membagikannya kepada masyarakat.

Terlaksananya program Raskin dengan baik tidak terlepas dari infrastruktur yang baik pula. Namun kenyataan yang ditemukan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tidak demikian. Infrastruktur yang ada sangat tidak mendukung untuk meningkatkan keberhasilan program Raskin. Karena tidak terdapat gudang untuk penyimpanan dan sarana prasana seperti jalan dan jembatan yang rusak. Hal tersebut selain menjadi kendala untuk terlaksananya program Raskin, juga sebagai tolak ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar kedepannya lebih baik.

Kedua butir di atas merupakan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program Raskin sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Raskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Landak Nomor 511.1/26/HK-2012 Tentang Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Landak.

#### 1. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut.

Keterbatasan literatur, keterbatasan waktu penelitian, minimnya waktu yang diberikan lembaga untuk melakukan penelitian, sulitnya menuju tempat penelitian karena kondisi infrastruktur yang sangat rusak seperti jalan dan

jembatan serta tidak tersedianya data-data, seperti monografi Desa.

#### E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan UNTAN, Pemerintah Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Sengah Temila, Pemerintah Desa Tonang serta masyarakat Desa Tonang yang terlibat dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- alqadrie, Syarif Ibrahim. 1993. *Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial Reorientasi Kebijakan Pembangunan dalam upaya Pengentasan Kemiskinan*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siswanto, H.B. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetomo. 2009 . *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Lukman Offset.

usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pembayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Study Kasus*. Yogyakarta: Caps.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan Bupati Landak Nomor 511.1/26/HK-2012 Tentang Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Landak.

### **Website**

Anggoro, (2008), *Evaluasi Kebijakan Raskin*, melalui <<http://par-excelence.blogspot.com/2008/05/skripsi.html>> (20/08/2013)

Bunkaes, (2013), *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kkabupaten Kepulauan Talaud*, melalui <<http://ejournal.unsrat.ac.id>> (20/08/2013)

Maria, (2012), *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Simpang Selayang di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan*, melalui <[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25443/6/Abstract.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25443/6/Abstract.pdf)> (20/08/2013)

Winandra, Andri, (2012), *Evaluasi Distribusi Program Beras Miskin (Raskin)*, melalui <<http://eprints.upnjatim.ac.id/view/types/thesis.html>> (20/08/2013)

### **Eliezer**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELIEZER  
NIM / Periode lulus : E42009056/ 2013  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address/HP : [eliezerezar@yahoo.co.id](mailto:eliezerezar@yahoo.co.id)/ 082148447146

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN  
DI DESA TONANG KECAMATAN SENGAH TEMILA  
KABUPATEN LANDAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 20 Februari 2014

  
(ELIEZER)